



BAB 3

GENDER DALAM EKONOMI KREATIF TENUN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Putri Rakhmadhani Nur Rimbawati

A. Pengantar

Perkembangan kain tenun di Indonesia bukan hal baru ketika tenun mulai diminati saat ini. Bahkan, banyak deretan nama desainer ternama yang menggunakan kain tenun untuk karya-karya yang diciptakannya. Kain tenun merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Indonesia yang sangat berharga serta memiliki keunikan tersendiri. Tak hanya memiliki unsur keindahan dan komersial saja, tenun juga memiliki nilai kearifan budaya lokal yang tinggi. Penggunaan kain tenun yang semakin berkembang dan banyak diminati masyarakat menunjukkan bahwa kain tenun memiliki nilai estetika, budaya, dan kualitas yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Pernahkah mendengar kebijakan pemerintah lokal untuk menggunakan tenun sehari dalam seminggu?

©2023 P. R. N. Rimbawati
Universitas Gadjah Mada, *E-mail*: putrirakhmadhani@gmail.com

Rimbawati, P. R. N. (2023). Gender dalam ekonomi kreatif tenun di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam P. R. N Rimbawati (Ed.), *Perempuan dan ekonomi kreatif tenun: Perspektif gender* (57–89). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.588.c671 E-ISBN: 978-623-8372-01-0

Semakin meluasnya penggunaan kain tenun sekaligus menawarkan peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Direktur Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) mengatakan dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) dengan ASEAN Studies Center UGM bahwa kebijakan tersebut ternyata sudah dimiliki oleh bupati dan gubernur dari pemerintah lokal. Kebijakan tersebut tak hanya memiliki tujuan untuk melestarikan budaya lokal, tetapi lebih dari itu untuk membantu meningkatkan perekonomian penenun yang mayoritas adalah perempuan. Kebijakan tersebut dilakukan satu hari dalam seminggu, yang biasanya di hari Kamis atau Jumat. Sejumlah daerah telah menunjukkan keseriusan memberlakukannya, seperti Lombok Tengah; Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; hingga Klaten, Jawa Tengah.

“Tujuannya ya untuk mengangkat tenun, seperti batik. Tenun sudah saatnya memiliki posisi yang sama seperti batik. Di sejumlah daerah tertentu sudah ada kebijakan pemerintah setempat untuk menggunakan tenun satu hari dalam seminggu, dengan itu kami juga mulai membuat tenun itu dengan bahan yang nyaman sehingga dapat digunakan sehari-hari” (MA, FGD dengan ASEAN Studies Center UGM, 17 Januari, 2018).

Kebijakan yang sudah berlaku itu dapat membantu masyarakat untuk mengenali lambang atau ciri khas dari daerahnya. Hal itu karena tenun memiliki ciri khas pada motif yang menjelaskan soal daerah masing-masing. Dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) dengan ASEAN Studies Center UGM, Direktur ASPPUK ini menjelaskan sejauh ini kebijakan tersebut juga memiliki nilai tambah karena telah memberikan dampak positif terhadap penghasilan penenun. Perkembangan dunia fesyen saat ini pun tak luput dari perhatian, mereka juga menyadari soal pentingnya bahan dari kain tenun agar dapat memiliki daya saing dalam ekonomi kreatif. Para penenun juga menggunakan bahan-bahan alami untuk menghasilkan kecenderungan warna yang lebih lembut karena terbuat dari pewarna alami, seperti kulit kayu banten, bakau, dan kunyit.

“Mungkin dulu banyak orang yang enggan menggunakan baju dengan bahan tenun karena dianggap tebal dan panas, tetapi sekarang sudah jauh berubah. Penenun sudah memahami soal penggunaan benang yang lebih bagus sehingga tidak membuat kain tenun begitu tebal. Mereka juga mulai minat dengan penggunaan pewarna alami yang memanfaatkan tumbuh-tumbuhan.” (MA, FGD dengan ASEAN Studies Center UGM, 17 Januari, 2018).

Seperti yang diharapkan, kebijakan tersebut pun mendapatkan sambutan baik dan antusiasme dari masyarakat. Perkembangan pembuatan kain tenun mengikuti minat pasar dan sudah modern sehingga masyarakat tidak canggung lagi dalam menggunakannya. Tidak hanya itu, warna-warni yang khas dari kain tenun yang dikenakan dapat menjadikan kebanggaan tersendiri bagi penggunanya. Untuk menarik minat berbagai kalangan konsumen, saat ini penenun cukup kreatif dengan mengemas tenun menjadi produk-produk fesyen dan aksesoris, seperti gelang, ikat kepala, peci, dan tas. Meskipun demikian, menurut MA kebijakan tersebut masih berlaku di wilayah lokal dan belum terjadi secara nasional.

MA menilai sejauh ini belum ada perubahan signifikan, pemerintah cenderung lebih mengutamakan soal kain batik. Seperti diketahui, kain batik sudah berkiprah hingga dunia internasional. Bahkan, batik menjadi ciri khas dari Indonesia. Memang tidak dapat dimungkiri untuk membuat kain tenun digunakan dalam kegiatan sehari-hari dibutuhkan campur tangan desainer supaya kain tenun dapat terlihat trendi dan mengikuti keinginan konsumen. Selain itu, dukungan konsumen dalam negeri juga perlu ditingkatkan dengan kecintaannya terhadap produk dalam negeri. Tentu hal ini akan menyokong kemampuan pelaku usaha dan penenun menjadi tuan di negeri sendiri.

B. Ekonomi Kreatif Tenun Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB)

Peran ekonomi kreatif dapat meningkatkan ekonomi secara global (Manurung, 2013). Sebagian orang berpendapat bahwa kreativitas

manusia adalah sumber daya ekonomi utama. Saat ini banyak sektor ekonomi kreatif yang lahir dari kreativitas dan inovasi dari setiap individu. Di Indonesia terdapat berbagai macam sektor yang termasuk ke dalam ekonomi kreatif dan perkembangan setiap tahunnya semakin meningkat.

Pelaku usaha di Indonesia perlu menyadari bahwa potensi ekonomi kreatif masih besar untuk digarap dan masih bisa terus digali untuk dikembangkan, namun mensyaratkan adanya kreativitas tinggi. Hal tersebut sejalan dengan Aufa dan Mulyati (2008) yang menegaskan bahwa industri kreatif berfokus pada kreasi dan eksploitasi karya kepemilikan intelektual seperti seni, film, permainan, atau desain fesyen, dan termasuk layanan kreatif antarperusahaan seperti iklan (Aufa & Mulyati, 2008). Ekonomi kreatif merupakan kegiatan usaha yang fokus pada kreasi dan inovasi. Provinsi Nusa Tenggara Barat kaya akan budaya serta tradisi yang bisa menjadi sumber kreativitas.

Sektor kerajinan merupakan jenis ekonomi kreatif yang memerlukan pengembangan. Sektor kerajinan meliputi proses kreasi, produksi, dan distribusi dari suatu produk kerajinan yang dihasilkan. Sektor kerajinan ini dibuat oleh tenaga perajin, mulai dari desain sampai proses hasil penyelesaiannya. Sektor kerajinan memanfaatkan serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, dan kayu serta nantinya akan dibuat menjadi seni kerajinan yang memiliki nilai jual yang tinggi.

Sektor tenun termasuk ke dalam sektor ekonomi kreatif. Aneka ragam tenun di Provinsi NTB dapat dikembangkan melalui ekonomi kreatif tenun yang memiliki pasar tersendiri baik di Indonesia maupun di internasional. Sektor tenun ini meliputi dari proses pembuatan tenun khas daerah, hingga pemasaran produk di Indonesia. Sektor tenun di Indonesia sudah memiliki pasar yang luas dan juga sudah bisa bersaing dengan pasar ritel modern. Sektor kuliner menjadi ekonomi kreatif yang cukup menjanjikan saat ini karena memiliki nilai ekonomis namun tetap memiliki keuntungan.

Sektor kerajinan dan kuliner dalam perkembangannya ikut andil memajukan pariwisata di NTB, seperti kerajinan tenun, serta kuliner yang mengalami perkembangan pesat. Ekonomi kreatif di NTB akan

besar dan bisa terus berkembang sebagai bisnis utama yang harus dikelola serius, dari bisnis kecil dengan pencatatan keuangan sederhana menjadi bisnis dengan pencatatan akuntansi profesional, dari bisnis kecil tanpa target menjadi bisnis dengan strategi tahunan yang nyata.

Selain itu, pemerintah menunjukkan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif tenun (peran produktif) berupa Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja PNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Pasal 11A Ayat 1 dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa PDH Batik/Tenun digunakan pada hari Kamis dan dapat digunakan pula pada: a. acara resmi tertentu di luar hari kerja; b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; atau c. sesuai dengan ketentuan acara. Meskipun demikian, pengembangan ekonomi kreatif memerlukan dukungan dari pemerintah yakni dengan pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, selain itu harus ada upaya kemudahan memperoleh bahan baku bagi pelaku ekonomi kreatif.

Tidak dapat dimungkiri, peran media sosial sangat memberikan potensi besar bagi pelaku bisnis, tak terkecuali pelaku ekonomi kreatif. Pelaku bisnis bisa menawarkan barang untuk dijual melalui media sosial sehingga ikut membantu dalam perkembangan ekonomi kreatif.

Saat ini sektor ekonomi pertanian dan ekonomi kreatif mulai lesu di NTB karena karakteristiknya yang *non-renewable*. Oleh karena itu, ekonomi kreatif di sektor kerajinan dapat diandalkan. Bidang ekonomi kreatif yang mengandalkan ide dan kreativitas dapat diandalkan sebagai sumber ekonomi tanpa batas.

NTB memiliki begitu banyak keanekaragaman kerajinan tangan khas daerah, salah satunya tenun. Selain sebagai kearifan budaya lokal, menenun juga menjadi sumber ekonomi masyarakat. Sebagian besar warga di NTB terutama para wanita berprofesi sebagai penenun, di sejumlah teras warga terdapat alat tradisional untuk menenun (*gedogan*). Hampir semua ibu-ibu bisa menenun dan diajarkan secara turun-temurun ke anak gadisnya.

Potensi kerajinan yang dimiliki oleh NTB merupakan modal untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang terus ditekuni oleh

perajin. Salah satunya adalah kerajinan tenun NTB yang terus bertahan hingga sekarang.

Ekonomi kreatif di Kabupaten Lombok Timur mempunyai peran yang sangat besar dalam menggerakkan roda pembangunan perekonomian di daerah tersebut. Peran tersebut tidak hanya terwujud dalam bentuk peningkatan jumlah industri dan nilai tambah produksi, tetapi juga mampu menyediakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha secara luas ke berbagai wilayah perkotaan dan perdesaan di setiap kecamatan di kabupaten tersebut.

Dalam indikator perusahaan/usaha industri formal menurut cabang industri di Kabupaten Lombok Timur dalam Tabel 3.1 menunjukkan penyerapan jumlah tenaga kerja pada cabang agro industri sebanyak 11.734 paling banyak dibandingkan cabang industri lainnya di Kabupaten Lombok Timur. Meskipun demikian, cabang industri hasil hutan, kimia dan tekstil juga memberikan kontribusi yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja.

Tabel 3.1 Indikator Perusahaan/Usaha Industri Formal Menurut Cabang Industri di Kabupaten Lombok Timur 2016

Cabang Industri	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Logam, Mesin dan Perekayasaan	19	367	26	393
Elektronik dan Aneka	23	363	25	388
Tekstil	240	630	683	1.313
Alat Pengangkutan	39	569	12	581
Kimia	175	1.646	314	1.960
Agro Industri	839	6.688	5.046	11.734

Cabang Industri	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Hasil Hutan	1.051	6.214	847	7.061
Jumlah	2.386	15.807	6.860	23.430

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur (2017)

Hal tersebut selaras dengan Tabel 3.2 yang menunjukkan perkembangan dan klasifikasi UKM di Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2011 hingga 2016. Jumlah UKM mikro dan kecil, penyerapan tenaga kerja, dan aset yang mengalami peningkatan tajam dari 2011 hingga 2016 dapat dilihat secara detail dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Perkembangan dan klasifikasi UKM di Kabupaten Lombok Timur 2011–2016

Tahun	Mikro			Kecil		
	Jumlah UKM	Tenaga Kerja	Aset (dalam Juta Rupiah)	Jumlah UKM	Tenaga Kerja	Aset (dalam Juta Rupiah)
2011	2.369	8.002	127.275	1.971	7.116	207.222
2012	2.660	8.944	131.509	2.337	8.857	215.272
2013	2.951	9.886	140.560	2.703	10.598	274.118
2014	3.085	9.622	149.612	3.804	12.881	332.963
2015	3.195	9.909	155.393	4.414	15.557	495.524
2016	11.475	11.475	89.679.350	5.930	11.860	73.149.768

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur (2017)

Tabel 3.3 Tabel Lanjutan Perkembangan dan klasifikasi UKM di Kabupaten Lombok Timur 2011–2016

Tahun	Menengah			Jumlah		
	Jumlah UKM	Tenaga Kerja	Asset (dalam Juta Rupiah)	Jumlah UKM	Tenaga Kerja	Asset (dalam Juta Rupiah)
2011	58	981	230.630	4.398	16.099	565.127
2012	80	1.250	230.630	5.077	19.051	577.411
2013	102	1.519	268.883	5.756	22.003	683.561
2014	80	1.250	307.137	5.077	19.051	683.561
2015	102	1.519	268.883	7.711	26.985	683.561
2016	219	657	8.130.975	17.624	23.992	170.960.093

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur (2017)

Dalam beberapa tahun ke depan, potensi pengembangan industri kecil di berbagai bidang usaha masih terbuka lebar. Selain itu, perkembangan dan klasifikasi UKM juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur terjadi pertumbuhan selama tahun 2011 sampai 2016. Sesuai dengan hasil pemetaan usaha kecil dan menengah kerja sama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB tahun 2015 bahwa jumlah UKM sebanyak 7.711 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 26.985 unit, kemudian meningkat tajam data tahun 2016 menurut Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB jumlah UKM sebanyak 17.624 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 23.992 unit dan total aset 170.960.093 juta rupiah seperti tampak pada Tabel 3.3.

Keberhasilan pembinaan usaha kecil dan menengah sangat ditentukan oleh pendayagunaan secara optimal sumber daya yang tersedia seperti pendayagunaan sumber daya alam dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola UKM, pembinaan secara terpadu dari pemerintah serta dukungan masyarakat. Di samping

itu, dalam rangka pembinaan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu partisipasi /koordinasi asosiasi-asosiasi pengusaha kecil dan menengah yang ada. Usaha mikro dan menengah berperan dalam meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan Bergeraknya sektor UKM, diharapkan kesejahteraan masyarakat turut meningkat.

Pelaku usaha kecil menengah (UKM) merupakan salah satu penggerak dan penguat ekonomi bangsa Indonesia karena bergerak di sektor riil yang melibatkan banyak warga tingkat bawah. UKM juga kini sudah banyak tumbuh subur di tengah masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja. Namun, pertumbuhannya harus dikawal agar dapat tumbuh kembang dan menjadi daya tahan kemajuan ekonomi bangsa.

Bank Indonesia kantor perwakilan Nusa Tenggara Barat mendorong ekonomi kreatif di sektor UMKM, salah satunya dengan membentuk kluster tenun di Desa Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat, PO, mengharapkan kluster tersebut bisa menjadi desa percontohan bagi desa lainnya. PO menegaskan bahwa dengan keterlibatan lima kelompok di Desa Pringgasele ini diharapkan dapat sebagai tempat belajar, juga dapat dijadikan sebagai pendukung pariwisata khususnya di Kabupaten Lombok Timur dan Provinsi NTB (Septarini, 2016).

Program ini dilakukan dalam rangka mendukung target penyaluran kredit UMKM sebesar 20% pada 2018, seperti tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.17/12/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Untuk menjaga konsistensi kemajuan UKM juga harus diikuti dengan pendampingan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta akses pasar yang terbuka. Keberadaan UKM cukup strategis dalam menjaga serta memajukan ekonomi ini sehingga pemerintah perlu terus memberikan perhatian. Pelatihan dan pendampingan terhadap UKM akan terus dilakukan, termasuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi pelaku UKM. Namun, maju tidaknya sebuah usaha akan sangat bergantung dari kesungguhan pelakunya.

Untuk bisa memajukan usaha ini, pelaku UKM harus memiliki mitra dan jejaring usaha yang berfungsi memasarkan produk. Membangun jejaring saat ini sangat mudah dengan kemajuan teknologi informasi.

Kepala Dinas Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, PSA, mengatakan ekspor NTB sampai sekarang masih banyak didominasi sektor pertambangan, sementara sektor lain, seperti sektor pertanian termasuk UMKM masih sangat rendah. “Ekspor kita paling besar masih didominasi sektor pertambangan, sementara sektor UKM masih sangat rendah, hanya 0,10 persen” (PSA, Wawancara Agustina Kustulasari dan Putri Rakhmadhani ASC UGM dengan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 17 Juli 2017). Padahal dari segi potensi, produksi UKM kita sangat potensial dan menjanjikan, baik berupa produk olahan maupun produk kerajinan yang dihasilkan para pelaku UKM. Ia mencontohkan produk tenun, Kabupaten Lombok Timur. Dahulu pasarannya melejit dan menjadi salah satu tujuan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, tetapi semenjak kasus bom Bali pada 2001, usaha kerajinan tenun seakan mati suri. Oleh karena itu, harus ada perubahan *mindset* di antara para pelaku UKM, bagaimana meningkatkan nilai jual produk yang dihasilkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas penjualan.

Salah satu terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai jual dan ekspor hasil produk UKM di NTB adalah dengan mengubah pola penjualan dan transaksi dari tunai menjadi nontunai melalui *digital banking*. Selain itu transaksi melalui nontunai juga memungkinkan masyarakat pelaku UKM bisa terhindar dari risiko kejahatan, seperti penipuan, uang palsu, dan kejahatan lain.

Ditambahkan, beberapa produk UKM yang telah menerapkan transaksi *digital banking* adalah kerajinan mutiara Sekarbela, Kota Mataram; kerajinan ketak, Desa Beleka Kabupaten Lombok Tengah; kerajinan tenun, Desa Sukarara Lombok Barat; dan kerajinan Cukli dari Desa Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Mataram. Untuk membantu mengakomodasi produk UKM NTB yang telah melakukan ekspor, Disperindag NTB pada 17 Agustus lalu telah meluncurkan *e-shop* sebagai media transaksi penjualan bagi pelaku UKM dengan menggandeng PT Pos Indonesia.

C. Peran Perempuan dalam Ekonomi Kreatif Tenun di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB)

Perubahan sistem perekonomian dalam masyarakat membawa perubahan pula pada alokasi ekonomi keluarga. Hal tersebut berdampak pada perubahan peran kaum perempuan dalam kontribusinya terhadap kesejahteraan keluarga.

Partisipasi perempuan di pasar kerja diduga akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesempatan mengenyam pendidikan, menurunnya jumlah anak yang dilahirkan, serta berbagai kemudahan teknologi yang membantu perempuan untuk menjalankan dua peran sekaligus, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai perempuan bekerja.

Bagi keluarga kelas bawah, keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam bidang ekonomi sangat berarti. Bagi mereka yang tinggal di wilayah tertinggal dan status ekonomi miskin, peran ganda bukan suatu hal yang baru. Bahkan bagi perempuan, berperan ganda sudah ditanamkan semenjak mereka kecil oleh orang tua. Para remaja putri tidak dapat bermain bebas seperti layaknya remaja lainnya karena terbebani kewajiban bekerja untuk membantu perekonomian keluarga (Soetrisno, 1997). Para perempuan, khususnya pada keluarga miskin tidak terlalu memedulikan pekerjaan yang akan mereka kerjakan. Sebagian besar mereka bekerja sebagai buruh dengan gaji rendah, seperti pembantu rumah tangga dan pekerjaan jasa domestik lainnya (Mudzhakar dkk., 2001).

Di Desa Pringgasela, Lombok Timur, NTB juga demikian. Namun, yang membedakan perempuan di desa ini adalah jenis pekerjaan yang digeluti. Perempuan Desa Pringgasela mayoritas bekerja di bidang ekonomi kreatif sebagai perajin tenun/penenun. Sebagian dari mereka bekerja berkelompok berdasarkan ikatan kekerabatan keluarga. Selain merupakan keahlian yang diperoleh turun-temurun, membuat tenun juga merupakan salah satu strategi ekonomi bagi mereka. Tingginya angka perempuan yang berstatus janda dan perempuan yang ditinggal oleh suami untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI mendorong pe-

rempuan di Desa Pringgasela untuk menekuni profesi sebagai pembuat tenun.

Salah satu studi tentang peran perempuan yang bekerja pada ekonomi kreatif tenun menyebutkan bahwa faktor utama yang mendorong perempuan bekerja pada ekonomi kreatif tenun adalah faktor ekonomi. Semakin sempitnya lahan pertanian dan berkurangnya kepemilikan lahan membuat pertanian dinilai tidak mampu lagi menjadi sumber mata pencaharian pokok keluarga. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan ekonomi di luar pertanian yang dapat menopang perekonomian keluarga, seperti industri rumah tangga atau industri kecil.

Mengingat pekerjaan di sektor pertanian yang bersifat musiman maka memungkinkan bagi keluarga petani untuk melakukan kegiatan non pertanian untuk menambah penghasilan keluarga. Walaupun dalam kasus Desa Pringgasela para perempuan perajin bukan berasal dari keluarga petani, dorongan ekonomi tetap menjadi alasan utama perempuan bekerja sebagai penenun.

Faktor alokasi waktu pun menjadi alasan yang rasional bagi perempuan untuk menggeluti usaha ini. Perempuan dinilai memiliki keleluasaan dalam penggunaan alokasi waktu karena peran domestik yang dimiliki. Para perempuan perajin bekerja setelah selesai melakukan pekerjaan rumah tangga. Rata-rata mereka bekerja 7–8 jam sehari, baik yang bekerja di rumah sendiri maupun bekerja di tempat pengusaha tenun yang masih kerabat. Dari wawancara dengan perempuan penenun, mereka menyatakan bahwa membuat tenun adalah kegiatan yang menyenangkan dan tidak merasa terbebani. Hal tersebut karena selain mendapatkan penghasilan, mereka bekerja tidak terikat dengan waktu dan tidak meninggalkan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga.

Potensi sumber daya kaum perempuan di Desa Pringgasela disadari merupakan modal dasar peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Namun, mayoritas perempuan di desa ini memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal tersebut berdampak pada kemampuan yang sangat terbatas dalam manajemen usaha, akses terhadap informasi harga, dan keterampilan bernegosiasi.

Selama ini ekonomi kreatif terus berkembang seiring perkembangan teknologi informasi yang melahirkan wujud kreativitas baru dalam bentuk ekonomi kreatif berdasarkan budaya lokal dan ilmu pengetahuan. Ekonomi kreatif tidak hanya mengenai penciptaan nilai tambah secara ekonomi, tetapi juga penciptaan nilai tambah secara sosial, budaya, dan lingkungan.

Pengembangan sektor usaha kecil dan menengah yang ada di NTB mutlak dilakukan dan diperlukan keseriusan pemerintah secara konsisten untuk terus melakukan evaluasi sebagai bagian dari ekonomi kreatif sehingga nantinya dapat bersaing di pasar lokal bahkan internasional.

Di Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, perempuan-perempuan mengoperasikan alat tenun tradisional di depan rumah mereka. Hasil kerajinan mereka adalah kain tenun ikat dan songket tenun. Desa wisata berbasis ekonomi kreatif, seperti Desa Pringgasela di Lombok Timur layak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah setempat untuk dikembangkan.

Menenun adalah sebuah kewajiban yang harus dikuasai oleh gadis di Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. Kemampuan menenun merupakan salah satu bagian dari kebudayaan kearifan lokal Desa Pringgasela.

Sebelum menikah, seorang gadis harus membuat sebuah tenunan untuk calon suaminya nanti. Selembar kain yang menjadi lambang cinta dan kepatuhan. Dengan menenun, seorang perempuan bisa membantu suaminya dalam mencukupi kebutuhan hidup.

Di Desa Pringgasela ini, pembeli atau pengunjung dapat mengikuti proses penenunan yang dilakukan oleh perempuan penenun. Mulai dari memintal benang, mengikat benang untuk mendapatkan motif, pewarnaan, hingga menenun. Semua itu dilakukan ketika seorang perempuan mempunyai waktu luang, setelah menyelesaikan pekerjaan rutin di rumah.

Kerajinan tangan yang berbasis ekonomi kreatif berupa kain tenun Pringgasela ini banyak dikenal di kalangan luas, tidak hanya di Indonesia. Kain tenun Pringgasela banyak dikenal di negara lain,

bahkan ada yang secara khusus datang dari luar negeri, yakni Jepang datang khusus ke desa ini untuk belajar membuat kain tenun. Jika potensi yang dimiliki Desa Pringgasele diberdayakan maka dapat mengembangkan ekonomi berbasis kreatif yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Kain tenun di Lombok terdiri dari dua jenis, yaitu tenun ikat dan songket. Kain tenun ikat dikerjakan oleh para lelaki dan dalam sehari mereka bisa menghasilkan hingga tiga meter kain tenun ikat. Adapun para perempuan penenun songket dalam sehari mereka hanya mampu menenun maksimal 15 cm songket.

Lombok memiliki dua jenis tenun, yaitu songket dan ikat. Tenun songket hanya dibuat oleh para perempuan dengan alat manual. Tenun ikat dibuat oleh para lelaki dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Kain songket biasa digunakan oleh para perempuan. Ciri khasnya, kain songket ini memiliki sisi depan dan sisi belakang. Songket biasanya menggunakan benang emas sebagai campuran dari bahan katun yang biasa dipakai.

Pembuatannya pun berbeda. Paling sulit dari pembuatan songket ini terletak pada penentuan motif. Pengerjaannya yang manual membuat waktu tenun menjadi lama. MH, penenun dari Lombok Timur ini menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan satu songket bisa selesai dalam satu bulan (Wawancara dengan MH, Penenun Lombok Timur, NTB, 17 Juli 2017). Bahkan, ada tenun songket yang baru selesai dalam waktu dua setengah bulan apabila motifnya rumit dan pengerjaannya tidak rutin.

NN, juga menambahkan bahwa para perempuan yang bekerja menenun songket dari pukul 08.00 hingga 17.00 biasanya hanya mencatat kemajuan tipis. “Sehari itu mereka bisa menenun minimal 10 sentimeter hingga maksimal 15 sentimeter. Panjang rata-rata tenun songket ini sekitar 12 sentimeter per hari” (Wawancara dengan NN, Penenun Lombok Timur, NTB, 17 Juli 2017)

Biasanya para perempuan menenun songket dengan lebar 60 sentimeter dan panjang empat meter. Setelah selesai, songket itu akan dipotong dan disambungkan sehingga menjadi kain dengan panjang 2

meter dan lebar 120 sentimeter. “Ciri khas lainnya adalah sambungan di tengah untuk menyatukan dua kain itu” (Wawancara dengan NN, Penenun Lombok Timur, NTB, 17 Juli 2017). Penyambungan kain itu tentu saja dilakukan oleh penjahit yang terampil agar motif dua belahan kain ini bisa menyatu sempurna. “Satu keluarga biasanya memiliki empat atau lima motif yang khas” (Wawancara dengan NN, Penenun Lombok Timur, NTB, 17 Juli 2017).

Adapun tenun ikat memiliki waktu produksi yang lebih singkat. Satu hari, penenun ikat dapat menyelesaikan hingga panjang 3 meter tenun ikat per hari dengan ATBM. Tenun ikat memiliki motif bolak-balik sehingga tidak dibedakan antara bagian depan dan bagian belakang. Tenun ikat hanya menggunakan bahan dari kain katun saja. Proses awalnya dimulai dari pemintalan benang. Setelah benang dipintal, benang-benang itu digambar motif dengan pensil. Motif tersebut lalu diikat dengan tali rafia untuk kemudian dicelupkan pada pewarna untuk dasarnya.

Perempuan dan tenun di Desa Pringgasela, Lombok Timur merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ekonomi kreatif tenun bagi kaum perempuan bukan hanya sekadar keahlian yang diperoleh melalui garis keturunan, melainkan juga sebagai identitas sosial dan kultural masyarakat Pringgasela yang dinamis dan berkesinambungan.

Kedinamisan dan kesinambungan ekonomi kreatif tenun di Desa Pringgasela terlihat jelas dari transformasi fungsional tenun yang berawal dari pemenuhan kebutuhan adat budaya, berubah menjadi komoditas pasar hingga diekspor ke mancanegara.

Perubahan ekonomi kreatif tenun tersebut secara langsung dirasakan berpengaruh terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya lokal. Perubahan yang terjadi juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan pengetahuan seni itu sendiri. Seperti dikemukakan Bakker (1984), perubahan itu berasal dari pengalaman baru, pengetahuan baru, teknologi baru, dan akibatnya dalam penyesuaian cara hidup dan kebiasaan pada situasi baru. Namun, di sisi lain, seni gerabah juga mengandung nilai kontinuitas. Kontinuitas berarti

keberlangsungan kebiasaan-kebiasaan lama yang dipertahankan atau dipelihara oleh tradisi sosial yang ditanamkan pada generasi penerus melalui sosialisasi, renovasi, dan inovasi.

Pandangan masyarakat lokal bahwa membuat tenun adalah pekerjaan perempuan secara tidak langsung juga menjadi tantangan dalam pengembangan ekonomi kreatif tenun. Cara pandang masyarakat lokal yang bias gender terkait beban kerja, meminimalisasi campur tangan kaum laki-laki dalam proses pembuatan tenun. Kaum suami yang ikut membuat tenun dipandang sebagai laki-laki yang kurang maskulin oleh masyarakat karena mengerjakan pekerjaan perempuan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang memakan waktu lama untuk mengubah cara pandang masyarakat lokal bahwa ekonomi kreatif tenun bukan hanya domain perempuan, laki-laki pun dapat berkontribusi di dalamnya. Hal ini menjadi penting, mengingat jenis pekerjaan pada setiap proses pembuatannya membutuhkan tenaga yang cukup besar. Dengan mendapat bantuan dari tenaga kerja laki-laki dapat meringankan beban perempuan perajin dalam memproduksi.

D. Ekonomi Kreatif Tenun Berperspektif Gender di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB)

Berdasarkan *framework* Moser (1993), ada enam *tools* dalam analisis gender terhadap kebijakan terkait ekonomi kreatif kain tenun di Kabupaten Lombok Timur, NTB, yaitu

1. *Gender roles identification-triple role*—peran lipat tiga;
2. *Gender needs assessment*—kebutuhan praktis dan strategis gender;
3. *Disaggregating control of resources and decision-making within the household*—siapa yang memiliki kontrol terhadap sumber daya dalam rumah tangga dan siapa yang memiliki *power* untuk membuat keputusan;
4. *Planning for balancing the triple role*—mengkaji dampak intervensi atau program pada peran *triple* perempuan;

5. *Distinguishing between different aims in interventions*—antara matriks kebijakan WID dan GAD; serta
6. *Involving women, and gender-aware organizations and planner, in planning*—melibatkan partisipasi perempuan, serta organisasi dan perencana yang sadar gender, dalam perencanaan.

1. Peran Lipat Tiga (*Triple Role*) di Kabupaten Lombok Timur

Di Lombok Timur menenun menjadi kegiatan mayoritas perempuan lintas usia (anak, remaja, dan dewasa). Menenun merupakan kerajinan turun-temurun yang tanpa dibina pun sejak umur 12 perempuan Lombok Timur sudah bisa melakukannya. Pada mulanya, tenun merupakan kegiatan adat yang dikerjakan di sela kesibukan utama para perempuan mengurus rumah tangga. Namun, sekarang tenun telah menjelma menjadi sumber penghasilan yang dapat menopang perekonomian rumah tangga selain dari bertani. Ibu-ibu penenun mengharapkan dari bertenun bisa membiayai sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, tenun tidak lagi menjadi kegiatan sampingan semata bagi perempuan di Lombok Timur, namun telah menjadi kegiatan rutin. Meskipun begitu, perempuan Lombok Timur tidak begitu saja melupakan tanggung jawabnya mengurus rumah tangga.

“Dari bangun pagi menyiapkan sarapan dulu. Waktu tidur, anak subuh sudah bangun. Setelah itu beres-beres rumah dulu, buat siapin sarapan, selesai itu tenun kita siapkan. Dari situ ada berapa jam setelah sarapan, masuk tenun. Sekitar jam 10–11, keluar lagi untuk masak makan siang keluarga. Setelah itu salat, masuk lagi menenun. Begitu setiap hari kita lakukan di desa kita. Begitu seterusnya, sampai asar lagi. Keluar dari tenun lagi, salat, istirahat sebentar, kadang-kadang masuk lagi ke tenun. Nah, baru malamnya kita istirahat. Tapi kadang-kadang ada juga yang masih nenun malam harinya gitu. Apa ya? Dibilang kerjaan samping-sampingan *full* ga ada istirahatnya maksudnya gitu. Terus-menerus kita kerjakan

kan karena pembuatannya cukup lama ya.” (MM, FGD di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 18 Juli, 2017).

Pentingnya peran perempuan dalam keluarga diistilahkan sebagai “tiang desa”.

“ . . . satu desa tidak akan kuat kalau tidak ada ibu, negara tidak akan kuat kalau tidak ada ibu. Kalau di desa dia mendirikan tiang desa, kalau di kabupaten Ibu Bupati jadi dutawan. Saya bukan tanpa dasar berbicara seperti itu, di rumah itu kalau ibu tidak perhatian pada anak, anak menjadi nakal. Karena bapak hanya keluar tidak peduli, dan perasaannya ya sedikit, kalau ibu sampai mati. Nah karenanya, dengan dasar karena dia tiang, makanya perlu kita jaga dengan baik. Kita buat dia wadah, kita satukan dia, kita bikinkan dia kegiatan, kita buat dia jadi penghasil.” (SH, Wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, 17 Juli, 2017).

Tak hanya melakukan aktivitas produksi tenun, ibu-ibu penenun memanfaatkan jaringan seperti bergabung dalam koperasi perempuan untuk memasarkan hasil tenunnya.

“Kita di Pringgasela kan ada 6 kelompok. Setiap kelompok dibimbing oleh LPSDM. Dulu tahun 2013 itu kita dibentuk kelompok, di setiap kelompok itu ada dua puluh orang dan di setiap kelompok juga memiliki pengurus, ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, di situ kita diajarkan membentuk koperasi kecil-kecilan mungkin istilahnya. Kita juga mengeluarkan simpanan pokok, simpanan wajib juga ada di setiap kelompok.” (MM, FGD di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 18 Juli 2017).

Meskipun sibuk dengan kegiatan reproduktif dan produktifnya, penenun perempuan di Lombok Timur tidak melupakan pentingnya kehidupan bermasyarakat. Mereka terlibat dalam forum-forum dengan pemerintah seperti Musrenbang Perempuan untuk menyampaikan aspirasi, tergabung dalam Forum Pengembanan Ekonomi Lokal (PEL) dan koperasi perempuan.

“Sementara ini dalam bentuk koperasi, jadi dibina dalam bentuk koperasi. Jadi dia bentuk koperasi perempuan istilahnya, di samping menampung dalam bentuk tabungan, dia juga memberi bantuan dalam bentuk tunai. Tentunya dalam aturan mereka, itu koperasi punya itu saya tidak bisa menjawab. Jadi di samping mereka membantu modal, peralatan juga dibantu, promosi juga ikut membantu sama dengan kita. Kerja sama, kolaborasi iya.” (SH, dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, 17 Juli, 2017).

Di Lombok Timur terdapat Musrenbang khusus perempuan yang prakarsai oleh LPSDM dan kemudian diakui oleh pemerintah daerah karena melihat respons dan dampak sosial yang dihasilkan cukup baik.

“... melalui Bappeda itu bisa terlaksana Musrenbang Perempuan, itu kan sudah ada, tapi perdanya tidak ada, sudah tidak penting perdanya saya katakan, yang penting dilaksanakan. Jadi, sudah empat tahun terlaksana Musrenbang Perempuan dan kemudian kita juga menginisiasi untuk di Lombok Utara. Jadi, dua kabupaten ini punya Musrenbang Perempuan. Bahkan pembelajaran dari Musrenbang Perempuan sudah diadopsi oleh Bappenas sebagai pembelajaran untuk mengisi laporan Indonesia dalam mengatasi capaian SDGs. Ini untuk menjawab bahwa perempuan-perempuan dari kelompok miskin dan marginal itu terlibat di dalam proses-proses pengambilan keputusan melalui Musrenbang Perempuan. Jadi, ini suatu kebanggaan bagi Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara. Lombok Timur sudah empat kali Musrenbang Perempuan dan nanti tahun depan akan sampai tingkat desa. Tapi, kemudian rencana-rencana yang sudah diusulkan oleh para ibu-ibu di sini dari berbagai unsur ini tidak bisa dikawal. Ada beberapa usulan yang ditolak dan dihapus karena dianggap tidak penting. Padahal sebetulnya penguatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan sumber daya perempuan terutama, baik itu di ekonomi, pelayanan konseling, pendidikan politik, itu semuanya masuk. Tapi, yang *goal* tahun ini hanya pendidikan politik.” (RN, FGD di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 18 Juli, 2017).

Kondisi sosial dan ekonomi selama ini menunjukkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki sehingga dampak kebijakan publik terhadap dua kelompok gender ini—sebagaimana pada kelompok etnis, ras, usia, daerah—berbeda. Analisis gender menentang pandangan *gender-neutrality*, dan membantu peneliti membandingkan bagaimana laki-laki dan perempuan terpengaruhi oleh suatu kebijakan (Status of Women Canada, 1996). Melalui analisis berbasis gender, perbedaan dampak sosial-ekonomi dapat diidentifikasi dan, pada gilirannya, dapat digunakan untuk memperbaiki implementasi kebijakan dan perumusan kebijakan berdasarkan bukti atau *evidence-based policy*.

Lalu, bagaimana peran laki-laki di Lombok Timur? Seperti pada umumnya, laki-laki di Lombok Timur melakukan aktivitas produksi seperti bertani, berkebun, dan tak jarang mereka terlibat dalam proses menenun, seperti membeli benang, menyiapkan alat tenun, dan membantu pemasaran hasil tenun.

“Jadi dalam mendidik anak itu siapa yang sempat memberi perhatian, dalam pembiayaan secara bersama-sama, tetap itu di bapak. Syukur kalau menghasilkan ibu-ibu, dengan demikian bapak juga pengertian jangan “Eh jangan kerja itu.” Tidak, mana dia memberi perhatian seperti membeli benang, membeli alat, bapaknya yang keluar. Kemudian yang memasarkan bapaknya.” (SH, Wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, 17 Juli 2017).

Menurut hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, 2% laki-laki terlibat dalam proses produksi tenun meskipun dengan ATBM. Ini berbeda dengan kebiasaan penenun perempuan yang menggunakan alat tenun tradisional.

“Tenun ini diproduksi rata-rata oleh perempuan, itu 98% perempuan jadi 2% nya laki. Yang laki pun itu bukan tenun yang tradisional, tapi tenun yang ATBM, sudah berkembang dari yang tradisional ke yang lebih maju. Berikutnya karena ini ditangani perempuan, yang namanya perempuan kan kalau tidak didampingi lemah, tidak punya pekerjaan kan lemah ya. Harganya juga lebih rendah kalau dia

sudah punya kesibukan, industri tenun nilai perempuannya semakin meningkat, semakin dihargai oleh orang lain.” (SH, dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, 17 Juli 2017).

Para lelaki ini juga memegang peran sebagai pemangku atau pemimpin baik di rumah maupun di masyarakat. “Kebanyakan perempuan ya yang menenun. Cuma yang jadi pemangku laki-laki.” (HI, FGD di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 18 Juli 2017).

2. Kebutuhan Praktis Gender di Lombok Timur

Beberapa kebutuhan praktis gender yang dibutuhkan oleh masyarakat Lombok Timur terutama penenun, di antaranya (a) penyediaan layanan kesehatan yang memadai, (b) peluang untuk mendapatkan penghasilan dari tenun, (c) penyediaan tempat tinggal dan kebutuhan dasar, dan (d) kebutuhan strategis gender.

a. Penyediaan Layanan Kesehatan

Penyediaan pelayanan kesehatan bagi para perempuan, khususnya penenun di NTB sangatlah diperlukan karena pekerjaan yang mereka geluti membuat mereka harus duduk lama berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan untuk membuat satu helai kain tenun. Untuk melihat akses dan ketersediaan pelayanan kesehatan, penulis melakukan wawancara dengan pihak dinas terkait, serta melihat tanggapan dari para penenun melalui FGD yang dilakukan di Lombok Timur, NTB.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di NTB, pembahasan akses pelayanan kesehatan hanya ditemukan dari hasil FGD yang dilakukan bersama para penenun dan LSM pendamping. Berikut potongan wawancara yang memberikan tanggapan terkait pelayanan kesehatan bagi para perempuan di NTB:

“... Pemeriksaan HIV-AIDS itu *delete*, coba? Pemeriksaan IVA dan *pap smear*, *delete*. Lah kalau ini semua usulan ibu-ibu sudah bersemangat untuk itu, tapi di *delete-delete-delete*, apa dong?...” (HI, FGD di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 18 Juli 2017).

Berdasarkan penggalan wawancara tersebut, terlihat bahwa beberapa pelayanan kesehatan IVA dan *pap smear* bagi perempuan di NTB telah dihapuskan sehingga memunculkan kekecewaan dari berbagai pihak untuk kembali memperjuangkan hak perempuan.

Pemeriksaan IVA dan *pap smear* sendiri sangat dibutuhkan perempuan untuk mendeteksi dini kanker serviks. Kanker serviks ini menjadi penyebab utama kematian perempuan nomor dua di dunia setelah penyakit jantung koroner. Setiap dua menit satu perempuan meninggal karena kanker tersebut. Di Indonesia, kanker serviks menjadi penyebab kematian utama dan terdapat lebih dari 15.000 kasus dan kurang dari 8.000 kematian per tahun. Jelas bahwa pemeriksaan IVA dan *pap smear* sangat dibutuhkan oleh para perempuan. Dengan dihapuskannya layanan tersebut, pemerintah telah memotong dan lalai dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi perempuan.

Penulis pun belum menemukan pemeriksaan kesehatan dan pelayanan khusus bagi para penun perempuan di NTB. Pelayanan kesehatan yang diberikan masih berupa pelayanan umum bagi para perempuan. Itu pun mengalami penghapusan pada pemeriksaan IVA dan *pap smear* sehingga terlihat bahwa kesejahteraan para penun perempuan belum menjadi perhatian utama pemerintah.

b. Peluang untuk Mendapatkan Penghasilan

Para perempuan di NTB mengawali menenun sebagai pekerjaan sampingan, tetapi lama-kelamaan pekerjaan menenun ini pun menjadi pekerjaan utama. Pekerjaan menenun ini sangat membantu beberapa penun perempuan yang memang berekonomi lemah. Pekerjaan menenun kemudian dikembangkan lebih intensif di kedua daerah tersebut sehingga para penun perempuan ini pun mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dan membantu membiayai sekolah anak-anak. Para suami mereka pun mengizinkan istri mereka untuk ikut menenun karena memang pekerjaan ini dapat membantu meningkatkan perekonomian.

c. Penyediaan Tempat Tinggal dan Kebutuhan Dasar

Akses yang terbuka bagi para perempuan di NTB untuk ikut membantu perekonomian keluarga menimbulkan problem lain, yakni mereka tetap harus melayani suami, mengurus anak, dan rumah tangga. Di lain pihak, mereka juga harus tetap berkonsentrasi untuk menyelesaikan tenunan dengan durasi yang cukup lama untuk sehelai kain tenun. Tidak jarang beberapa penenun perempuan yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak, menitipkan anak mereka pada sanak famili karena mereka harus segera menyelesaikan tenunan mereka.

d. Kebutuhan Strategis Gender

Kebutuhan strategis gender yang dibutuhkan oleh masyarakat Lombok Timur terutama penenun, di antaranya 1) pembagian kerja gender, 2) pengurangan beban pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, 3) penghapusan diskriminasi, serta 4) ancaman kekerasan laki-laki.

1) Pembagian Kerja Gender

Penenun di NTB didominasi oleh para perempuan baik itu yang masih remaja maupun sudah berkeluarga. Para suami bekerja di ladang, kuli bangunan, dan pekerjaan lainnya. Namun, para suami tetap terlibat dalam proses menenun, seperti yang dapat digambarkan pada kutipan berikut:

“Asalamualaikum wr.wb. Peran suami saya sangat banyak membantu, ketika saya masuk menenun ya saya meminta bantuannya sedikit. Kan ada prosesnya banyak sekali, ketika dia tidak bekerja dia bantu melinting. Kan kita udah di dalem, pas gesek papannya habis, papan kan yang masukan benang itu. Itu kalau sudah habis pas kita udah duduk, dia kita suruh bantu. Banyak sih sebenarnya. Kalau kita disuruh buat itu, kita keluar, kopi, buatkan makan, setelah itu kita masuk lagi. Suami bekerja kuli bangunan, serabutan. Kalau pas ada kerjaan dia tidak bantu, kalau pas tidak ada kerjaan dia kita suruh bantu. Mau sih tapi, sama sebenarnya, kalau pas dia lagi butuh mau dibeliin rokok ya kita bantu dia beliin rokok. Sebenarnya pas dia keluar gaji sebulan, kadang dua bulan, apalagi kalau penghasilan

tenun tidak mencukupi. Apalagi wajib kita keluarkan 15 ribu per-pagi, itu wajib siang atau malam, paginya belum, ngajinya belum. Belum anaknya minta dua atau tiga ribu, kan penghasilan kita satu kain tenun dua minggu itu 400 kalau kita jual, kalau dia laku lagi. Kadang dua minggu kadang satu bulan jadinya, tergantung kita masuk. Kalau kita masuk jam enam pagi keluar jam 10 pagi bisa itu jadi dua minggu ...” (HI, FGD di Lombok Timur, 18 Juli, 2017).

2) Pengurangan Beban Pekerjaan Rumah Tangga dan Pengasuhan Anak

Para perempuan penenun di NTB bertanggung jawab sepenuhnya pada pengasuhan anak dan pekerjaan rumah. Mereka pun tetap harus menenun.

“... Dari bangun pagi menyiapkan sarapan dulu. Waktu tidur, anak subuh sudah bangun. Setelah itu beres-beres rumah dulu, buat siapin sarapan, selesai itu tenun kita siapkan. Dari situ ada berapa jam setelah sarapan, masuk tenun. Sekitar jam 10–11, keluar lagi untuk masak makan siang keluarga. Setelah itu salat, masuk lagi menenun. Begitu setiap hari kita lakukan di desa kita. Begitu seterusnya, sampai asar lagi. Keluar dari tenun lagi, salat, istirahat sebentar, kadang-kadang masuk lagi ke tenun. Nah baru malamnya kita istirahat, tapi kadang-kadang ada juga yang masih nenun malam harinya gitu...” (IS, FGD di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 18 Juli, 2017).

Berdasarkan penggalan wawancara tersebut, tergambar bahwa belum ada bantuan yang cukup dari para suami terhadap pekerjaan di rumah.

3) Penghapusan Diskriminasi

Berdasarkan hasil wawancara di NTB, ditemukan bahwa NTB belum memiliki progres dan respons yang cukup baik terhadap perempuan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa diperlukan adanya prioritas program yang memang melindungi para perempuan dari diskriminasi

baik dalam politik maupun ekonomi. Seperti contohnya program tersebut, antara lain

- a) pelatihan anggaran berbasis gender (*gender budget statement*);
- b) pelatihan pemberdayaan ekonomi dengan memberikan dana usaha kepada kelompok usaha dibantu oleh PKK;
- c) kegiatan PUG yang mencakup pelatihan tentang gender analisis kebijakan; dan
- d) pelatihan *public speaking* dan manajemen kepemimpinan bagi para perempuan.

4) Ancaman Kekerasan Laki-laki

Pembahasan tentang kekerasan di rumah tangga yang dilakukan oleh suami terdapat pada hasil wawancara dengan Dinas Sosial NTB. Menurut Dinas Sosial NTB jarang sekali ditemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh para suami kepada istrinya.

3. Sumber Daya di Lombok Timur

Faktor pertama adalah sumber daya alam. Sementara itu, untuk sumber daya alam, ekonomi kreatif tenun memiliki beberapa keterbatasan untuk menciptakan ekonomi kreatif yang masif. Kurangnya perkebunan kapas di daerah membuat ekonomi kreatif yang banyak digeluti perempuan ini sulit untuk mendapatkan sumber daya apalagi berkembang. Perkebunan kapas telah menurun drastis selama dekade terakhir. Dengan demikian, kebutuhan perempuan untuk mendapatkan sumber daya didapatkan dari luar daerah. Pada awal tahun 1900, ada berbagai perkebunan kapas di NTB. Namun, karena kurangnya dukungan dan pasar pemerintah, banyak petani memutuskan untuk menutup perkebunan tersebut. Pemerintah sebagai aktor terkemuka di ekonomi kreatif ini tidak melakukan apa pun jika menyangkut penurunan sumber daya alam. Perkebunan kapas merupakan sumber daya alam utama dalam ekonomi kreatif tenunan. Untuk mengolah ekonomi yang sehat, pemerintah perlu mendukung ekonomi lokal, dalam hal ini, ekonomi kreatif tenunan. Singkatnya, baik pria maupun wanita

kurang dalam mengakses sumber daya. Untuk menghasilkan, penenun perlu mengimpornya dari wilayah lain. Dengan demikian, membuat mereka sangat rentan terhadap gangguan pasokan sumber daya.

Faktor kedua adalah pelatihan. Ada berbagai pelatihan yang diberikan kepada para penenun perempuan, mulai dari peningkatan kapasitas hingga keterampilan administrasi. Setiap daerah memiliki kebijakan sendiri—bergantung pada institusi dan departemen. Di NTB, misalnya, ada beberapa pelaku yang terlibat dalam penguatan kapasitas penenun perempuan di NTB, salah satunya adalah Bank Indonesia. Alih-alih memberi mereka uang, Bank Indonesia mengambil pendekatan yang berbeda, mereka memperkuat kemampuan perempuan dalam bidang tenun melalui pelatihan. Dengan demikian, mereka akan bisa mendukung diri mereka di masa depan. Ada juga upaya untuk membentuk persatuan antara penenun perempuan untuk memajukan minat mereka terhadap ekonomi kreatif tenun. *Union* memungkinkan mereka memiliki daya tawar yang lebih tinggi kepada pemerintah.

Faktor ketiga adalah modal. Ada upaya dari pemerintah untuk menempatkan perempuan pada serikat perempuan, yang memungkinkan mereka mengakses pinjaman dari sektor swasta atau pemerintah. Sulit bagi penenun individu untuk mendapatkan pinjaman karena mereka dianggap kurang kompeten dibandingkan serikat pekerja. Dalam serikat, aktivitas mereka bisa diukur. Ini akan menjadi gerakan berisiko untuk meminjamkan seseorang karena tidak ada yang bertanggung jawab jika ada yang salah arah. Lebih jauh lagi, akan lebih mudah bagi debitur untuk mengawasi kemajuan yang dibuat oleh individu yang menjadi anggota serikat pekerja.

Di NTB, faktor pinjaman lebih mudah karena pemerintah tidak mewajibkan mereka untuk berada dalam serikat pekerja. Karena kebijakan yang berbeda di institusi tersebut, Pemerintah NTB mengizinkan penenun perempuan untuk menerima pinjaman berdasarkan penampilan mereka dan bukan berdasarkan pada apakah mereka anggota serikat atau tidak. Pemerintah mengakui bahwa ada beberapa kendala dalam membantu masyarakat, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengelola uang di masyarakat.

Faktor keempat adalah pemasaran. Pemasaran telah lama menjadi faktor yang menentukan keberhasilan satu produk, ekonomi kreatif tenunan tidak terkecuali. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah NTB menghasilkan solusi yang berbeda. Perempuan yang membuat tenunan sering tidak mendapatkan keuntungan sebanyak kolektor karena kurangnya pengetahuan manajerial dan pemasaran. Selanjutnya, kolektor adalah orang yang bertanggung jawab menjual produk tenunnya ke dunia luar. Para kolektor sering membeli produk tenunan dengan harga terendah dan menjualnya dengan harga lebih tinggi. Dengan demikian, NTB bermaksud untuk mengajarkan alat pemasaran agar perempuan di ekonomi kreatif tenunan dapat menunjang dirinya di masa depan. Di beberapa tempat, pemasaran ditangani oleh Kepala, yang berarti laki-laki. Wanita yang menciptakan tenun dan pria menjualnya. Di NTB, pemerintah antusias dalam mempromosikan ekonomi kreatif tenun melalui pameran, baik lokal maupun internasional.

4. Menyeimbangkan Peran dan Perencanaan Intersektoral di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB)

Kondisi yang relatif sama terkait fasilitas permodalan juga terjadi di NTB meskipun dukungan koperasi di NTB belum terlihat kuat. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah komitmen dan perhatian pemerintah daerah NTB yang cenderung mengarah kepada sektor pariwisata sebagai kekuatan ekonomi masyarakat dan pemasukan daerah. Hal yang menarik untuk disoroti dari berbagai intervensi yang dilakukan di Kabupaten Lombok Timur dan di level provinsi di NTB adalah program-program yang mendukung penyampaian aspirasi penenun. Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dan Musrenbang Perempuan adalah dua contoh kuat dari keberhasilan advokasi organisasi masyarakat sipil di NTB untuk mendorong pemerintah melibatkan (penenun) perempuan dalam perencanaan pembangunan.

Forum PEL adalah forum lintas dinas dan sektoral yang meskipun digagas oleh LSM, telah disambut baik dan menjadi komitmen

Bappeda Provinsi. Forum ini mempertemukan pihak-pihak terkait pembangunan ekonomi secara rutin sehingga menjadi tempat menyampaikan aspirasi yang sangat baik bagi perwakilan penun perempuan. Musrenbang Perempuan juga adalah inisiatif yang digagas oleh LSM dan dimulai di Lombok Timur, tetapi kini telah menjadi model bahkan di daerah lain seperti Aceh.

Kedua provinsi telah menunjukkan berbagai contoh intervensi yang dilaksanakan guna mendorong produksi tenun, dengan harapan akan dapat meningkatkan kesejahteraan para perempuan pelaku usaha rumah tangga/mikro. Beberapa hal, seperti yang telah diungkapkan, perlu terus menjadi perhatian bagi pelaku, pengamat, dan utamanya pembuat kebijakan di NTB. Program intervensi perlu memperhatikan dan mempertimbangkan peran ganda-tiga perempuan sehingga program/proyek yang dilaksanakan tidak memberi beban atau tekanan tambahan bagi perempuan di salah satu peran dan menghambat penyeimbangan aktivitas di peran yang lain. Selain itu, dibutuhkan lebih banyak program yang bersifat intersektoral yang responsif gender sehingga perencanaan gender dalam pembangunan dapat mewujudkan emansipasi perempuan dari subordinasi mereka, serta menuju *equality*, *equity*, dan *empowerment*.

5. Peningkatan Peran Wanita dan Gender dalam Pembangunan di Lombok Timur

Peningkatan peran wanita dan gender dalam pembangunan di Lombok Timur dapat ditingkatkan dengan beberapa rencana, seperti kesejahteraan, ekuitas, anti-kemiskinan, efisiensi, dan pemberdayaan.

a. Kesejahteraan

Kesejahteraan kesehatan perempuan di NTB kurang menjadi fokus utama karena seperti telah disebutkan pada *tools 2*, pelayanan IVA dan *pap smear* telah dihapuskan di NTB.

b. Ekuitas

Kesetaraan gender di NTB dapat terlihat pada akses organisasi yang diberikan kepada perempuan sehingga para perempuan dapat ikut berpartisipasi dalam Musrenbang dan koperasi, seperti halnya yang dilakukan oleh bapak-bapak.

c. Anti-kemiskinan

Program peningkatan dan pemberdayaan ekonomi sudah dijalankan di kedua daerah tersebut. Program-program yang dilakukan oleh pemerintah NTB adalah

- 1) pemberian pelatihan untuk meningkatkan produktivitas penenun; dan
- 2) pembentukan koperasi penenun perempuan.

Namun, program-program ini tidak didukung dengan pemberian dana kepada para pelaku usaha kecil tersebut.

d. Efisiensi

Seperti yang telah diketahui pada beberapa poin sebelumnya bahwa perempuan diberikan akses untuk berorganisasi. Sayangnya, partisipasi perempuan dalam berorganisasi ini pun terlihat tidak efisien karena pada akhirnya urusan keluarga yang akan terlebih dahulu diutamakan.

“...Semua keinginan sudah dituangkan, hanya realisasinya belum. Lebih diutamakan bapak-bapak, karena mereka bilang harus sawah yang diutamakan dulu. Jadi, ada realisasi pengerjaan saluran irigasi sudah dikerjakan semua. Mama-mama punya permintaan masih belum terjawab.” (IS, FGD di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 18 Juli, 2017).

Selain permintaan, kebutuhan dan kepentingan perempuan yang belum lancar jalannya di organisasi, pemberdayaan ekonomi dengan adanya pelatihan dan pembinaan pun dapat dinilai kurang efisien karena permasalahan yang paling penting adalah pemasaran

produk. Para penenun menghadapi kesulitan dalam memasarkan produk setelah produksi tenun mereka jadi. Terkadang mereka harus menjual tenun mereka dengan harga murah karena membutuhkan uang dengan cepat. Hal ini menjadi pilihan utama mereka karena jika menjual di toko suvenir maka akan membutuhkan waktu hingga produk mereka terjual. Bahkan, harga jualnya pun bervariasi, ada yang tinggi yang pastinya menguntungkan para penenun, tetapi ada juga yang memberikan harga rendah.

e. Pemberdayaan

Program pemberdayaan ekonomi khusus ekonomi kreatif tenun perempuan belum terlihat di NTB. Program yang dijalankan pemerintah lebih kepada ekonomi kreatif secara umum. Bahkan, berdasarkan FGD di NTB, anggaran dinas pemberdayaan perempuan lebih kecil daripada alokasi infrastruktur.

6. Pelibatan Perempuan dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB)

Pelibatan perempuan dalam forum perencanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur, NTB menggambarkan vitalnya peran forum yang diinisiasi oleh pemerintah daerah yang berfungsi memberi masukan bagi pemerintah daerah. Salah satu forum tersebut adalah forum Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).

“...Forum Pengembangan Ekonomi Lokal *konsen* mengangkat tenun menjadi produk unggulan. Perempuan, ibu-ibu juga menjadi *konsen* kami, karena kita melihat kalau ini kita angkat menjadi produk unggulan, berarti itu akan memberi ruang bagi para ibu-ibu penenun untuk tenun itu sudah tidak menjadi usaha sampingannya. Ini sebenarnya di tingkat kabupaten sudah mendiskusikan bagaimana mendudukkan para *stakeholder-stakeholder*, misalnya *art shop-art shop* itu untuk membangun kesepakatan harga misalnya. Supaya antar *art shop* satu dengan *art shop* lainnya tidak berbeda, tetapi kita

punya standar gitu.” (RR, FGD di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 18 Juli 2017).

Selain forum yang diinisiasi oleh pemerintah daerah, kelompok atau organisasi masyarakat sipil yakni LPSDM juga turut serta dalam menginisiasi dan memfasilitasi pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi kreatif tenun. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran kelompok–kelompok penenun di Pringgasea.

Secara substansi (konten), isu kepentingan perempuan terkait dengan ekonomi kreatif tenun juga sudah diartikulasikan oleh perempuan melalui forum perencanaan (Musrenbang). Untuk itu, pemerintah dan instansi terkait terus mendorong berkembangnya ekonomi kreatif tenun di Lombok Timur. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memperkenalkan dan mempromosikan toko kerajinan atau *art shop* yang bergerak di bidang kerajinan tenun dan suvenir.

E. Penutup

Pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Lombok Timur NTB dapat terus dikembangkan sebagai tulang punggung ekonomi kreatif. Dukungan dapat diberikan dengan memfasilitasi para pelaku UKM kreatif secara khusus melalui peningkatan keterampilan di bidang permodalan. Ekonomi kreatif tercipta dari pemanfaatan serta keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu untuk bisa membuat lapangan pekerjaan baru dan juga bisa menciptakan kesejahteraan di daerah. Ekonomi kreatif merupakan hasil dari kreativitas dan daya cipta setiap individu.

Penenun perempuan telah menunjukkan geliatnya dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur NTB. Perempuan-perempuan merupakan kelompok yang proaktif dalam peningkatan kesejahteraan, paling tidak di keluarganya. Mereka merupakan kelompok yang aktif karena berani mengambil inisiatif dalam pengembangan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.

Penguatan terhadap kapasitas perempuan perajin juga harus tetap diagendakan. Hal ini karena pelaku utama ekonomi kreatif tenun adalah perempuan. Strategi yang paling umum dilakukan adalah menempatkan perempuan secara langsung sebagai penerima manfaat utama (Holmes & Jones, 2010). Bentuk bimbingan langsung kepada perempuan penenun berupa pelatihan teknis pembuatan, desain, dan pemasaran dinilai sukses meningkatkan kapasitas perempuan di desa Pringgasela. Selain itu, hasilnya juga terlihat dari munculnya kader-kader perempuan yang memiliki jiwa wirausaha dan mampu untuk menjadi *leader* dalam pemberdayaan perempuan. Perempuan yang berdaya dapat menjadi agen ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa melakukan investasi melalui pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan satu langkah ke depan untuk mewujudkan kesetaraan gender, mengentaskan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA



- ASEAN. (2015). *ASEAN economic community blueprint 2025*.
https://www.asean.org/storage/2016/03/AECBP_2025r_FINAL.pdf
- Aufa, F & Mulyati, S. (2008). *Ekonomi kreatif: Perekonomian berbasis seni sebagai alternatif pembangunan perekonomian Indonesia*. Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. (2017). *Kabupaten Lombok Timur dalam angka 2017*. <https://lomboktimurkab.bps.go.id/publication/2017/08/11/64ed2d794d5335ba27991438/kabupaten-lombok-timur-dalam-angka-2017.html>
- Bakker, S. (1984). *Filsafat kebudayaan: sebuah pengantar*. Kanisius.
- Holmes, R., & Jones, N. (2010). *Rethinking social protection using a gender lens : Working Paper 320*. Overseas Development Institute.

- Manurung, M. E. (2013). Peran perempuan dalam membangun kewirausahaan kreatif busana muslim dan film di Bandung. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, XXII(1), 1–20.
- Moser, C. (1993). *Gender planning and development: theory, practice & training*. Routledge.
- Al-Hibri, A., Mudzhar, M. A., & Abdullah, M. A. (Ed). (2001). *Wanita dalam masyarakat Indonesia*. Sunan Kalijaga Press.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2016). Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 10 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Nusa Tenggara Barat. (2016). https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/Pergub%20No.%2010%20Tahun%202016.pdf
- Septarini, E. C. (2016, Desember 14). *Dorong UMKM kreatif, Bank Indonesia NTB bentuk klaster tenun*. Bisnis.com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20161214/87/612010/dorong-umkm-kreatif-bank-indonesia-ntb-bentuk-klaster-tenun>
- Soetrisno, L. (1997). *Kemiskinan perempuan dan pemberdayaan*. Kanisius.
- Status of Women Canada. (1996). *Gender-based analysis: a guide for policy making*. Staigh Associates Limited.
- Throsby, D. (2010). *The economics of cultural policy*. Cambridge University Press.
- UNDP (2012, 27 Juli). *Gender and economic policy management initiative: Asia and the Pacific*. <https://www.undp.org/asia-pacific/publications/gepmi-module-02-%E2%80%93gender-responsive-policy-analysis>
- World Health Organization. (2011). *Gender mainstreaming for health managers: a practical approach*. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44516/9789241501064_eng.pdf